



Rancangan
RENJA

Rencana Kerja
Perangkat Daerah

2026

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOMOR B/00.7/806/BR.8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran sasaran kebijakan dan sasaran program perlu dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

- KESATU : Rencana Kerja Tahun 2026 menjadi dokumen acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- KEDUA : Evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2026 dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,



FAISHOL MUSLIM



KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR B/00.7/807/BR.8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan sasaran program perlu dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas
1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026
 2. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026;
 3. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Maret 2025

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,



FAISHOL MUSLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B/00.7/807/BR.8
TANGGAL: 6 MARET 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SECRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Penanggung- jawab
2.	Tri Sumardiyati, S.I.P.	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Ketua
3.	R. Rahman A. Fandaru S.Sos., M.P.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
4.	Drs. Wiryawan Sudianto, M.Si.	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
5.	Sri Ardiningsih, S.H.	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
6.	Lusina Siwi Lastriningsih, S.K.M., M.Kes.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Munsif Sahirul Alim, S.Si., M.Si., M.Eng.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Ahmad Hanif, S.I.P., M.P.A.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9.	Tri Rudati, S.Pd., M.M.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10.	Marsudi, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10.	Susilowati Myrra Dewi, S.I.P.	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
11.	Oktarifa Widyastuti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,



Formulir E. 29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2026

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja - Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RRPD provinsi.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	V			
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	V			



Yogyakarta, 6 Maret 2025
 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SETDA DIY.

FAISHOL MUSLIM, S.I.P., M.Si.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2022-2027. Rencana Kerja dan Rencana Strategis tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan. Program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi tema dan isu strategis yang berkaitan dengan bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta fasilitasi keagamaan. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026, Biro Kesejahteraan rakyat membutuhkan dukungan serta kerjasama yang sinergis dari pihak internal maupun eksternal.

Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung konsistensi perencanaan yang berkesinambungan serta mewujudkan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Maret 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,



Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB 1	PENDAHULUAN.....	1-1
1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Landasan Hukum.....	1-2
1.3	Maksud dan Tujuan	1-2
1.4	Sistematika Penulisan.....	1-4
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	2-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-16
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-18
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2-22
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-2
3.3	Program dan Kegiatan	3-4
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	4-1
BAB 5	PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	2-1
Tabel 2. 2 Realisasi Anggaran TA. 2024	2-5
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	2-7
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	2-18
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-22
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2025	2-29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	3-3
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-4
Tabel 4.1 Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	4-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menurut Henry Fayol merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, perencanaan merupakan langkah awal yang perlu disiapkan dalam upaya mencapai tujuan dengan cara penetapan strategi yang efektif agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menyusun Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2022-2027 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang meliputi tema dan isu strategis yang berkaitan dengan bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, dan fasilitasi keagamaan. Adanya Renja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026 diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
2. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penyusunan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2026.

2. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Renja.

3. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program dan Kegiatan.

4. Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5. Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2026.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Adanya perubahan kelembagaan pada tahun 2025 sesuai dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2024, bahwa Biro Bina Mental Spiritual berganti nomenklatur menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan maka perlu dilaksanakan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja sasaran strategis Biro Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	n/a	40	42,85	107	100	107
2	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	n/a	67,5	160	237	100	237
3	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	n/a	A (88,18)	A (92,07)	104,41	A (88,21)	104,41

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan indikator tujuan “*Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda*” sebesar 42,85 % dari target 40% sehingga persentase total capaian terhadap target sebesar 107%. Di samping itu, indikator kinerja sasaran berupa persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tercapai 160% dari target 67,5%, atau persentase total capaian terhadap target sebesar 237%. Pada indikator kategori reformasi perangkat daerah, capaian tahun 2024 sebesar 92,07 dari target 88.18. Sehingga, persentase total capaian terhadap target sebesar 104,41%. Capaian indikator tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator yang ada pada dokumen acuan yang berbeda antara RPD DIY 2022-2026 dan RPJMD DIY 2022-2027.

Terdapat tiga program pemda yang diukur dengan tujuh indikator program pemda yang didukung oleh Biro Bina Mental Spiritual yaitu:

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
 - a. Harapan Lama Sekolah (HLS);
 - b. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum);
 - c. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum.
2. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH);
 - b. Prevalensi Stunting;
 - c. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.
3. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak benda
 - a. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional).

Lima kebijakan yang dihasilkan Biro Bina Mental Spiritual telah mendukung 3 Indikator Program Pemda dari 7 Indikator Program Pemda tersebut, meliputi:

1. Surat Edaran Gubernur DIY terkait Sinkronisasi Pergub No 92 Tahun 2020 tentang RAD Stunting dengan RAN PASTI (mendukung Program Pemda terkait prevalensi stunting)
2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 400.7.10 / 2697 tentang Penguatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (mendukung Program Pemda terkait Angka Harapan Hidup)
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2024 tentang RAD Kesehatan Jiwa (mendukung Program Pemda terkait Angka Harapan Hidup)
4. *Policy Note* Pengembangan SMA Negeri 1 Seyegan sebagai Sekolah Berbasis Sains, Budaya, dan Olahraga (mendukung Program Pemda terkait Harapan Lama Sekolah (HLS))
5. *Policy Note* Studi Kelayakan Pendirian SMA Berbah (mendukung Program Pemda terkait Harapan Lama Sekolah (HLS)).

Terdapat 11 dokumen bahan kebijakan yang ditindaklanjuti, diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 109/KEP/2024 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2024
2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 2/SE/111/2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY
3. Surat Edaran Gubernur DIY terkait Sinkronisasi Pergub No 92 Tahun 2020 tentang RAD Stunting dengan RAN PASTI
4. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 400.7.10 / 2697 tentang Penguatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Instruksi Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2024 tentang RAD Kesehatan Jiwa
7. Rancangan Surat Edaran Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah
8. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 111/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Haji DIY Tahun 1446H/2025M

9. Surat Keputusan Gubernur DIY No 116/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian *Zoonosis* dan Penyakit Infeksius Baru
10. *Policy Note* Pengembangan SMA Negeri 1 Seyegan sebagai Sekolah Berbasis *Sains*, Budaya, dan olahraga
11. *Policy Note* Studi Kelayakan Pendirian SMA Berbah

Di samping itu, terlaksananya kegiatan fasilitasi keagamaan yang terdiri dari:

1. Pembinaan Mental 5 Agama:
 - a. Islam: Pengajian Pejabat Aparat, Peringatan Hari Santri Nasional, Peringatan Isra' Mi'raj, Peringatan Maulud Nabi, Peringatan Nuzulul Qur'an.
 - b. Katolik: Perayaan Paskah
 - c. Kristen: Perayaan Paskah
 - d. Hindu: Perayaan Nyepi
 - e. Budha: Perayaan Waisak
2. Pelayanan Jamaah Haji: Seleksi PHD, Pembekalan/Pelatihan Petugas Haji, Pelepasan Jamaah Haji, Monitoring Keberangkatan Petugas dan Jamaah Haji, Penyambutan kepulangan jamaah haji.
3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan: Utsawa Dharma Gita Daerah DIY, Pemberangkatan Kontingen Utsawa Dharmagita di Komplek Kepatihan, MTQ Daerah, Rakerda LPTQ, Pelatihan MTQ, Eksebisi dalam rangka pengiriman kontingen MTQ ke tingkat Nasional, MTQ Nasional di Samarinda.
4. Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan: Sosialisasi Penyaluran Hibah Rumah Ibadah, Penyaluran Hibah 8 Lembaga Keagamaan, Survey Rumah Ibadah, Konsultasi Pemberkasan Hibah Rumah Ibadah, Pencairan dana hibah sebanyak 749 rumah ibadah, Terlaksananya Monitoring rumah ibadah yang sudah menerima hibah, Terlaksananya monev rumah ibadah oleh surveyor, Pembayaran Honorarium Surveyor, Laporan pertanggungjawaban hibah rumah ibadah dan lembaga keagamaan.

Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indika tor	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisa sasi	% Rea lisasi	Target (Rp)	Realisa si (Rp)	% Rea lisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Terwujud nya bahan rumusan kebijakan strategis yang menduk kung pencapai an pembangu nan bidang kesejahte raan rakyat	Persent ase bahan kebijak an yang menduk ung progra m pemda	40%	42,85 %	107%	27.016. 250.400	26.187. 057.635	97 %	829.192 .765
1.	Meningkat nya kualitas perumu san bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkat nya fasilitasi kehidupan beragama	Persent ase hasil kajian, koordin asi, monitori ng dan evaluasi bidang bina mental, kesehat an dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan	67,5%	160%	237%	26.222. 458.400	25.692. 849.418	98 %	529.608 .982

No	Tujuan/ Sasaran	Indika tor	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisa sasi	% Rea lisasi	Target (Rp)	Realisa si (Rp)	% Rea lisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebijakan							
2.	Meningkat nya Tatakelola Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han di Perangkat Daerah	Katego ri Refor masi Birokra si Perang kat Daerah	A (88.18)	A (92,07)	104,4 1%	591.587 .000	494.208 .217	84	97.378. 783
Jumlah						27.016. 250.400	26.187. 057.635	97 %	829.192 .765

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian tujuan dan sasaran sebesar Rp27.016.250.400, terealisasi Rp26.187.057.635 atau 97% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp829.192.765 atau 3% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam SHBJ Daerah

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
SEKRETARIAT DAERAH										
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan	n/a	n/a	5 dokumen	11 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti								
		Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	4 rumusan	4 rumusan	100%	4 rumusan	4 rumusan	100%
		Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan	n/a	n/a	75%	100%	133.33%	100%	100%	100%
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	n/a	n/a	763 unit	749 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	n/a	n/a	13 lembaga	13 lembaga	100%	9 lembaga	9 lembaga	100%
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	n/a	n/a	10 dokumen	10 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,	n/a	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan								
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	n/a	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	90.36	89,60	99.16%	90.58	90.58	100%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	10 dokumen	10 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan								
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	19 unit	19 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	51 unit	51 unit	100%	32 unit	32 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	24 unit	24 unit	100%	12 unit	12 unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis Urusan kesejahteraan rakyat. Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Kepala Biro;
2. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Biro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
- a. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, serta perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;

- c. fasilitasi kehidupan beragama;
- d. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- e. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- f. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai.

Perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat diantaranya dilakukan dengan analisis yang mendalam pada peraturan-peraturan pusat yang relevan untuk diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, merencanakan strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat capaian target-target pembangunan yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat.

Upaya mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi. Sinergitas pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu Biro Kesejahteraan Rakyat memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY selain memiliki fungsi menyiapkan rumusan bahan kebijakan, juga memiliki fungsi untuk memfasilitasi pelayanan publik, yaitu fasilitasi kehidupan beragama dan Posbindu Satriya. Fasilitasi kehidupan beragama meliputi kegiatan pembinaan mental, pelayanan jamaah haji, penyelenggaraan festival keagamaan, serta fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan. Sedangkan Fasilitasi Posbindu Satriya dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan kepada pegawai di lingkungan Komplek Kepatihan melalui deteksi dini penyakit tidak menular.

**Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	-	-	n/a	n/a	67,5	80	90	n/a	n/a	160%	100%	100%	Capaian indikator sasaran tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator yang ada pada dokumen acuan yang berbeda antara RPD DIY 2022-2026 dan RPJMD DIY 2022-2027.

*realisasi capaian di akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa sektor yang berada di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY diantaranya keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan. Beberapa isu strategis yang dapat diuraikan terkait dengan bidang yang menjadi kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY antara lain:

A. Bidang Keagamaan

1. Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
2. Perlu penguatan pelayanan jamaah haji dengan upaya pembukaan embarkasi

di DIY yang lebih memadai;

3. Belum optimalnya peran rumah ibadah sebagai sarana dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat yang baik;
4. Fasilitasi pemberdayaan Pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi generasi muda belum optimal;
5. Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan belum optimal;
6. Penguatan kaum Rois sebagai panutan agama berbasis budaya belum optimal.

B. Bidang Pendidikan

1. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya potensi dan kualitas lulusan pendidikan pada semua jenjang;
3. Kurangnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di Masyarakat;
4. Belum optimalnya pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya;
5. Perlunya pengembangan pusat-pusat unggulan mutu Pendidikan;
6. Masih adanya ketimpangan antar wilayah kab/kota terkait Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah;
7. Belum maksimal tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja;
8. Masih tingginya angka putus sekolah di DIY;
9. Minat baca dan budaya literasi masih rendah.

C. Bidang Kesehatan

1. Masih adanya ketimpangan kualitas layanan kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY;
2. Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
3. Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional;
4. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;

5. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
6. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi;
7. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
8. Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;
9. Masyarakat DIY belum sepenuhnya aktif membayar iuran BPJS kesehatan.

D. Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan

1. Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;
2. Prestasi olahraga dalam kompetisi perlu terus ditingkatkan;
3. Belum optimal pengembangan kapasitas kaum muda yang berperan dalam pembangunan;
4. Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda untuk mengembangkan potensi;
5. Angka pengangguran di usia muda masih tinggi.
6. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
7. Belum optimal jumlah perpustakaan yang terakreditasi;
8. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip belum seluruhnya sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
9. Pelaksanaan penyusutan berupa pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip belum sesuai standar.

E. Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pencegahan penanganan gelandangan dan pengemis;
2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak di DIY;
3. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
4. Belum maksimalnya pengarusutamaan gender di DIY;
5. Belum optimalnya pemenuhan hak penyandang disabilitas;

6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kalurahan/kelurahan;
7. Belum optimalnya regenerasi anggota kelembagaan di masyarakat;
8. Belum optimalnya pelatihan keterampilan SDM di BUMKal dan BUMDes;
9. Belum meratanya kualitas SDM dalam BUMKal dan BUMDes.

Isu-isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan isu sosial yang berdampak negatif sehingga dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat membutuhkan koordinator yang bertugas untuk memberikan arah dan strategi kebijakan di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY selaku SKPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah diharapkan mampu untuk berperan sebagai koordinator utamanya dalam urusan kesejahteraan rakyat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY**

Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	9,808,500,000	14 Laporan	7,443,476,600	Berkurang 2,365,023,400
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	9,808,500,000	14 Laporan	7,443,476,600	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	2 dokumen	16,805,719,400	2 dokumen	16,805,719,400	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Tempat Ibadah yang Difasilitasi	500 unit	12,600,989,200	500 unit	12,600,989,200	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 Lembaga	4,204,730,200	8 Lembaga	4,204,730,200	

4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	12 dokumen	783,854,800	12 dokumen	783,854,800	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Dokumen	502,000,000	3 Dokumen	502,000,000	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen	196,756,400	6 Dokumen	196,756,400	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	85,098,400	3 Dokumen	85,098,400	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	6 dokumen	319,295,200	6 dokumen	319,295,200	

4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	64,000,000	3 Dokumen	64,000,000	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	255,295,200	3 Dokumen	255,295,200	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	10,666,600	12 dokumen	10,666,600	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,459,000	4 Dokumen	7,459,000	

4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1,385,600	4 Dokumen	1,385,600	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,822,000	4 Laporan	1,822,000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	13,778,000	3 dokumen	13,778,000	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8,663,000	1 Dokumen	8,663,000	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,713,000	1 Laporan	2,713,000	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2,402,000	1 Laporan	2,402,000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	12,425,000	1 dokumen	12,425,000	

4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	12,425,000	1 laporan	12,425,000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 dokumen	262,116,930	6 dokumen	262,116,930	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,610,000	1 Paket	4,610,000	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,451,900	1 Paket	14,451,900	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,628,000	1 Paket	2,628,000	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,090,000	2 Paket	15,090,000	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,764,000	1 Dokumen	1,764,000	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	223,573,030	1 Laporan	223,573,030	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	8,900,000	2 dokumen	8,900,000	

4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3,900,000	1 Laporan	3,900,000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	174,928,000	5 dokumen	174,928,000	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,592,000	1 Unit	34,592,000	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	96,054,000	5 Unit	96,054,000	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2,340,000	6 Unit	2,340,000	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	29,182,000	32 Unit	29,182,000	

4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12,760,000	12 Unit	12,760,000	
	Jumlah Total			28,200,183,930		25,835,160,530	

Rancangan awal RKPD DIY Tahun 2026 sebesar 28,200,183,930, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini. Jumlah anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan menjadi 25,835,160,530. Penyesuaian kebutuhan perlu dilakukan dengan tetap memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran agar penyelenggaraan tata pemerintahan dapat berjalan dengan optimal menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2026
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Biro Kesejah teraan Rakyat
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (Bermas)	4 Rumusan	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	5 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase 4 jenis fasilitas kegamaan	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	2 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Tempat Ibadah yang Difasilitasi	500 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	12 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja	6 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat

	Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	6 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88.20 (A)	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI tahun N	90.81	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat

4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat

4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	5 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Urusan Pemerintahan Daerah		
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan tahun 2026 mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat di RPJMD. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menyusun rencana strategis tahun 2022-2027 untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis disusun dengan memperhatikan keselarasan RPJMD dengan prioritas nasional serta mencakup pembahasan mengenai isu strategis dan kebijakan nasional agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antara kebijakan nasional dan daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada Visi RPJMD DIY tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Adapun Biro Kesejahteraan Rakyat mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai leading sektor kebijakan startegis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar serta fasilitasi kehidupan beragama. Harapannya upaya penyelarasan program prioritas nasional dan daerah dapat mewujudkan pembangunan nasional yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi pembangunan bidang bina mental dan spiritual adalah **”Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat”**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah :

1. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah,

Sasaran ini dicapai dengan indikator:

1. Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan
2. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran (%)				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	N/A	67,5	80	90	100
		Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	N/A	A 88.18	A 88.19	A 88.20	A 88.21

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Rencana Tahun 2026		Sumb er Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Rp7,443,476,60 0	Dais	13 Laporan	Rp6,000,00 0,000
2.22.08.5.0 9	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Rp7,443,476,60 0	Dais	13 Laporan	Rp6,000,00 0,000
2.22.08.5.0 9.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Rp7,443,476,60 0	Dais	13 Laporan	Rp6,000,00 0,000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (Bermas)	4 Rumusa n	Rp7,952,083,80 0	APBD	4 Rumusan	Rp10,910,2 07,000
		Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	5 dokumen	Rp21,275,000,0 00	APBD	5 dokumen	Rp24,800, 000,000
		Persentase 4 jenis fasilitasi kegamaan	100%	Rp19,500,000,0 00	APBD	100%	Rp22,500, 000,000
4.01.04.1.0 1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan	2 dokumen	Rp16,805,719,4 00	APBD	2 dokumen	Rp22,500, 000,000

		beragama yang dilaksanakan					
4.01.04.1.0 1.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Tempat Ibadah yang Difasilitasi	500 unit	Rp12,600,989,200	APBD	500 unit	Rp17,000,000,000
4.01.04.1.0 1.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 Lembaga	Rp4,204,730,200	APBD	8 Lembaga	Rp5,500,000,000
4.01.04.1.0 2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksana Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	12 dokumen	Rp783,854,800	APBD	12 dokumen	Rp1,200,000,000
4.01.04.1.0 2.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Dokumen	Rp502,000,000	APBD	3 Dokumen	Rp450,000,000
4.01.04.1.0 2.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen	Rp196,756,400	APBD	6 Dokumen	Rp500,000,000
4.01.04.1.0 2.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	Rp85,098,400	APBD	3 Dokumen	Rp250,000,000
4.01.04.1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksana Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	6 dokumen	Rp319,295,200	APBD	6 dokumen	Rp1,100,000,000
4.01.04.1.0 3.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	Rp64,000,000	APBD	3 Dokumen	Rp300,000,000

4.01.04.1.0 3.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	Rp255,295,200	APBD	3 Dokumen	Rp800,000,000
		Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88.20 (A)		APBD	88.21 (A)	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI tahun N	90.81	Rp529,500,000	APBD	91.03	Rp674,500,000
4.01.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	Rp10,666,600	APBD	12 dokumen	Rp18,500,000
4.01.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp7,459,000	APBD	4 Dokumen	Rp10,000,000
4.01.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp1,385,600	APBD	4 Dokumen	Rp3,500,000
4.01.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp1,822,000	APBD	4 Laporan	Rp5,000,000
4.01.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp13,778,000	APBD	3 dokumen	Rp21,000,000

4.01.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp8,663,000	APBD	1 Dokumen	Rp11,500,000
4.01.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp2,713,000	APBD	1 Laporan	Rp5,000,000
4.01.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp2,402,000	APBD	1 Laporan	Rp4,500,000
4.01.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp12,425,000	APBD	1 dokumen	Rp15,500,000
4.01.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Rp12,425,000	APBD	1 laporan	Rp15,500,000
4.01.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp262,116,930	APBD	6 dokumen	Rp396,500,000
4.01.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp4,610,000	APBD	1 Paket	Rp4,500,000
4.01.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp14,451,900	APBD	1 Paket	Rp16,000,000
4.01.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp2,628,000	APBD	1 Paket	Rp4,000,000
4.01.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp15,090,000	APBD	2 Paket	Rp19,000,000

4.01.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp1,764,000	APBD	1 Dokumen	Rp3,000,000
4.01.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp223,573,030	APBD	1 Laporan	Rp350,000,000
4.01.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	Rp8,900,000	APBD	2 dokumen	Rp13,000,000
4.01.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp5,000,000	APBD	1 Laporan	Rp7,000,000
4.01.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Rp3,900,000	APBD	1 Laporan	Rp6,000,000
4.01.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	Rp174,928,000	APBD	5 dokumen	Rp210,000,000
4.01.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp34,592,000	APBD	1 Unit	Rp45,000,000
4.01.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp96,054,000	APBD	5 Unit	Rp120,000,000
4.01.01.1.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Rp2,340,000	APBD	6 Unit	Rp4,000,000
4.01.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Rp29,182,000	APBD	32 Unit	Rp25,000,000

4.01.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Rp12,760,000	APBD	12 Unit	Rp16,000,000
	Total			25,835,160,530			64,857,707,000

Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2026 merencanakan anggaran sebesar Rp25,835,160,530 sedangkan tahun 2027 merencanakan anggaran sebesar Rp64,857,707,000. Pada tahun 2026 Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 28 subkegiatan. Perencanaan anggaran tahun 2026 dan 2027 bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2026, Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 28 subkegiatan. Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dibiayai oleh dana keistimewaan. Terlampir rencana kerja dan target kinerja tahun 2026 yang akan dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung tercapaian sasaran dan program.

Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
				2026
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	90
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A

BAB 5 PENUTUP

Pada tahun 2026, Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 28 subkegiatan. Program tersebut terdiri dari Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didanai APBD, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang didanai oleh dana keistimewaan. Rencana kerja tahun 2026 memuat isu strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar serta fasilitasi keagamaan.

Optimalisasi perumusan kebijakan dilakukan melalui analisa kebijakan yang mengacu pada isu strategis yang sedang berkembang. Keberhasilan perumusan kebijakan didukung oleh beberapa faktor diantaranya, ketepatan menganalisa kebutuhan regulasi, koordinasi dan sinkronisasi yang intensif, serta dukungan anggaran yang baik. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama antar sektor untuk mewujudkan pembangunan yang sinergis, inklusif, dan berkelanjutan.

Harapannya, ketersediaan dokumen rencana kerja 2026 dapat dijadikan landasan untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam optimalisasi perumusan kebijakan terkait bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar serta fasilitasi keagamaan. Di samping itu, rencana kerja diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, ketersediaan dan kebutuhan akan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat pada satu tahun mendatang.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Telp: (0274) 562811 Pswt: 1169

Website: <https://kesra.jogjaprov.go.id/>

Email: birokesra@jogjaprov.go.id